

---

**Dinamika Hambatan dan Strategi Vietnam dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia****Mutia Astar<sup>1\*</sup>, Muh. Asy'ari<sup>1</sup>**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, 90231, Kota Makassar\*Correspondence's e-mail: mutiaastar8@gmail.com

---

**Abstract:** Security threats are not only limited to military confrontation, regional conflict and nuclear proliferation. Security threats could also be originated from non-military dangers, such as natural disasters, pandemic, global warming, and transnational crime. The threat of human trafficking is among the most concerning non-conventional security threats, especially in Southeast Asia. Natural disaster and military conflict often lead to mass human migration, and those refugees are the most vulnerable to trafficking. This issue needs to be addressed and manifested in a specific anti-trafficking regulation. Thus, this writing will try to identify and analyze the challenges faced by Vietnam on countering human trafficking. Researchers uses qualitative research methods in the effort of identifying these challenges. Data gathered through library research to strengthen the argumentative critics. This writing argues that Vietnam faced several challenges in countering human trafficking problem; economic factor, weak authority/security apparatus in Vietnam, and easier transportation modes for the criminal organizations to conduct their activities.

**Keywords:** human trafficking, Vietnam, challenges, transnational crime.

---

**Abstrak:** Ancaman keamanan bukan hanya berkaitan tentang konfrontasi militer, sengketa wilayah dan proliferasi nuklir. Tetapi ancaman keamanan juga berasal dari bahaya non-militer, seperti bencana alam, penyakit menular, pemanasan global dan juga kejahatan transnasional. Ancaman keamanan perdagangan manusia menjadi salah satu isu besar di antara ancaman-ancaman keamanan nonkonvensional ini, khususnya di Asia Tenggara. Bencana alam dan konflik militer membuat orang-orang yang mengungsi sangat rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia sehingga perlu adanya regulasi dalam penanganan tindak kejahatan ini. Karenanya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hambatan-hambatan Vietnam dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang terus meningkat dianggap sebagai isu yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Peneliti dalam upaya untuk mengetahui hambatan-hambatan tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk memperkuat kritik argumentatif dan sumber dalam penulisan. Penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang menjadi persoalan dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Vietnam, yaitu: faktor ekonomi, lemahnya kapabilitas aparat hukum dalam menjaga keamanan Vietnam, kemudahan transportasi di level internasional sehingga memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi sindikat transnational criminal organizations.

**Kata Kunci:** perdagangan manusia, Vietnam, hambatan, kejahatan transnasional.

---

**1. Pendahuluan**

Ancaman keamanan bukan hanya berkaitan tentang konfrontasi militer, sengketa wilayah dan proliferasi nuklir. Tetapi ancaman keamanan juga berasal dari bahaya non-militer yakni, seperti bencana alam, penyakit menular, pemanasan global dan juga kejahatan transnasional. Di antara ancaman keamanan yang tidak konvensional ini, perdagangan manusia menjadi isu besar, khususnya di Asia Tenggara, dimana bencana alam dan konflik militer membuat orang-orang yang mengungsi sangat rentan terhadap kejahatan ini.

Perdagangan manusia atau Human Trafficking berawal dari merektut, memindahkan, mengirim orang yang kemudian tujuannya untuk dieksploitasi. Perdagangan manusia pada umumnya diketahui menggunakan cara kekerasan, menipu dan memaksa. Eksploitasi dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau transaksi jual beli organ tubuh. Sedangkan perdagangan anak

biasanya dijual ke luar negeri untuk kemudian diadopsi, sebagai pengemis atau untuk tujuan pemujaan suatu keagamaan (Gozdziak & Collett, 2005).

Kasus perdagangan manusia merupakan isu yang kini telah menjadi kasus internasional. Isu Pelanggaran HAM ini merupakan kasus yang hampir terjadi disetiap negara. Dunia internasional terus berusaha mencari solusi untuk meminimalisir permasalahan perdagangan manusia ini, namun belum ada suatu hal yang menunjukkan angka turunnya kasus perdagangan manusia. Di Asia Tenggara, perdagangan manusia merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang transnasional dan kompleks. Masalah perdagangan manusia ini, terkadang disebut sebagai “perbudakan modern” yang mempengaruhi sekitar kurang lebih 40 juta wanita, pria dan juga anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa tanpa upah, eksploitasi seksual dan pernikahan paksa (Geneva, 2017).

Perdagangan manusia sekarang menjadi salah satu kejahatan terorganisir yang menguntungkan, yakni menghasilkan sekitar kurang lebih dari \$150 miliar per tahunnya. Dua pertiga dari korbannya, atau 25 juta orang, berada di Asia, menurut Indeks Perbudakan Global Walk Free Foundation 2016 (Gallaghe, 2016). Perdagangan manusia umum terjadi, hampir diseluru negara di dunia, termasuk Asia Tenggara. Dalam hal ini terdapat tiga negara di Asia Tenggara yang kasus perdagangan atau eksploitasi manusianya cukup tinggi yaitu Kamboja, Vietnam, dan Thailand. ASEAN sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia seperti memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada ketiga negara dengan kasus perdagangan manusianya cukup tinggi seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand (U.S Depaterment of State, 2021).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan suatu jenis kasus kejahatan lintas batas negara terorganisir. UNODC mendefinisikan kasus kejahatan ini sebagai kejahatan internasional di mana perempuan, laki-laki dan anak-anak dieksploitasi sebagai buruh atau tenaga kerja dan pekerja seksual, perdagangan manusia merupakan kasus kejahatan transnasional yang jelas melanggar HAM yang telah dilindungi oleh hukum internasional (the law of nations) dan hukum domestik negara-negara beradab. Walaupun target perdagangan manusia terdiri dari perempuan, laki-laki dan anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa perempuan lebih mudah menjadi korban perdagangan manusia yang mana mereka lebih lemah secara mental dan fisik dari laki-laki. Seperti yang terjadi di Vietnam, perempuan lebih rentan untuk diperdagangkan.

Vietnam menjadi negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia tertinggi pada tahun 2018. Klaim ini dapat dikonfirmasi oleh data yang menunjukkan bahwa 739 perempuan Vietnam direkrut, yang kemudian dikirim dan dijual. Pada tahun yang sama, Vietnam termasuk dalam daftar 10 besar negara di dunia yang populasi perempuannya banyak terlibat dalam perdagangan manusia (Nguyen et al., 2020)

Penyebab perdagangan manusia di Vietnam yakni karena rendahnya tingkat pendidikan, lowongan pekerjaan bagi perempuan dan juga ketimpangan ekonomi yang tidak memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Menurut United Nations, terdapat beberapa faktor pendorong atau yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia di Vietnam, yaitu faktor ekonomi, antara lain: kemiskinan dan hutang, kurangnya pemahaman akan perdagangan manusia, permasalahan keluarga, pendidikan, pemerintah yang korupsi dan juga pengaruh eksternal, seperti pengaruh lingkungan tempat tinggal (U.S Depaterment of State, 2019).

Perdagangan manusia tidak hanya menjadi ancaman bagi individu tertentu, tetapi perdagangan manusia juga merupakan ancaman nyata bagi negara Vietnam, mengingat daerah perbatasan adalah jalan utama bagi para pelaku perdagangan manusia, sehingga dapat membawa korbannya ke negara tujuan. Tidak hanya itu, tetapi juga di daerah perbatasan, dapat memfasilitasi *transnational criminal organizations* (TCO) untuk perdagangan narkoba dan pencucian uang, sehingga mengancam keamanan negara Vietnam dan dunia internasional (Gozdziak & Collett, 2005).

Perdagangan manusia adalah masalah besar dan perlu ditangani oleh pemerintah Vietnam, meskipun pada dasarnya pemerintah Vietnam belum membentuk Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di negaranya, sehingga hal ini menjadi cukup logis sebagai salah satu alasan terjadinya peningkatan kasus perdagangan manusia di Vietnam. Pada tahun 2019, Pemerintah Vietnam baru saja meratifikasi beberapa konvensi terkait dengan isu kemanusiaan atau HAM internasional (Thontowi, 2019).

Dari sekian banyak konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Vietnam, hanya terdapat dua konvensi yang mengatur terkait perlindungan perempuan dan anak. Akan tetapi, pemerintah ASEAN menyatakan bahwa meratifikasi konvensi saja kurang untuk menjamin terhadap perlindungan HAM di setiap negara-negara anggota ASEAN, dan setiap negara-negara anggota membutuhkan badan pengawas yang didedikasikan untuk mengawasi perlindungan HAM di masing-masing negara di ASEAN, dan hanya terdapat beberapa negara-negara saja yang membentuk lembaga perlindungan HAM di negaranya, akan tetapi Vietnam menjadi salah satu negara yang masih belum juga membuat institusi perlindungan Hak Asasi Manusia di negaranya (Thontowi, 2019).

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan penulis bahas pada skripsi nantinya. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperkuat kritik argumentatif dan sumber dalam penulisan skripsi. Peneliti melakukan penelitian yang menitikberatkan pada pendeskripsian rumusan masalah melalui analisis kritis terhadap materi ilmiah selama proses penelitian skripsi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder, yaitu sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil laporan dan juga berasal dari buku, jurnal serta berita-berita terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis. Dan juga jenis dan sumber data ini dapat diterapkan untuk menjelaskan terkait dengan fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di masyarakat yang sebelumnya belum ada penjelasannya. Hasil penelitian ini merupakan signifikansi dari masalah atau peristiwa yang penulis kaji.

## **3. Temuan dan Diskusi**

### **3.1 Fenomena Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi karena sejumlah alasan. Kasus perdagangan manusia sering terjadi di negara berkembang dan negara konflik, termasuk Vietnam. Setiap tahun jumlah korban dalam kasus ini terus bertambah, beberapa di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 70% korban perdagangan manusia adalah anak-anak dan perempuan yang tinggal di daerah perbatasan dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (Lan, 2015).

Perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi seksual menjadi isu yang semakin kompleks di seluruh dunia. Perdagangan manusia adalah industri besar yang telah diidentifikasi sebagai industri kriminal dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perdagangan manusia dapat mencakup beberapa komponen berbeda yang dapat mencakup perdagangan seks, perdagangan tenaga kerja, dan perdagangan organ.

Perdagangan seks adalah perdagangan manusia ke dalam prostitusi. Adapun Perdagangan tenaga kerja adalah ketika seseorang diperdagangkan untuk pekerjaan non-seksual. Contohnya dapat mencakup seorang pria yang diperdagangkan untuk pekerjaan dibidang pertanian, atau seorang wanita yang diperdagangkan untuk menjadi pembantu. selain dari pada itu, perdagangan organ adalah ketika orang diperdagangkan sehingga organ mereka dapat dijual untuk digunakan dalam transplantasi. Dalam aktivitasnya sejumlah korban perdagangan manusia dipaksa masuk ke dalam perdagangan ini dengan berbagai cara seperti kekerasan fisik yang digunakan terhadap mereka, atau

penipuan yang dibuat oleh para pedagang. Contoh dengan menipu para korban dengan cara peluang kerja palsu, atau pernikahan di luar negeri.

Pada kasus yang terjadi di negara Vietnam, Vietnam menjadi negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia tertinggi pada tahun 2018. Klaim ini dapat dikonfirmasi oleh data yang menunjukkan bahwa 739 perempuan Vietnam direkrut, yang kemudian dikirim dan dijual. Pada tahun yang sama, Vietnam termasuk dalam daftar 10 besar negara di dunia yang populasi perempuannya banyak terlibat dalam perdagangan manusia (Nguyen et al., 2020)

Peningkatan jumlah korban perdagangan manusia dalam kurun waktu yakni dari tahun 2015 terdapat sejumlah 223 korban, kemudian pada tahun 2016 terus bertambah menjadi 234, kemudian terjadi peningkatan kasus lagi sebanyak 350 korban pada 2017, dan pada tahun 2018 menunjukkan jumlah korban yang sangat signifikan yakni dari 350 korban pada tahun 2017 menjadi 739 korban pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 279 kasus, kemudian tahun 2020 sejumlah 102 korban yang diidentifikasi, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah korban lagi menjadi 121 korban. hal ini menjadikan permasalahan yang urgensi untuk ditangani negara Vietnam (U.S Department of State. 2020).

Vietnam adalah negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan manusia yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan, seperti kerja paksa, perdagangan seks, pekerja anak, dan perdagangan organ. Ini adalah negara sumber utama perdagangan perempuan dan anak perempuan, terutama dari kelompok etnis minoritas dan latar belakang yang lebih miskin, ke dalam industri seks regional dan global. Selain itu, baik orang dewasa maupun anak-anak Vietnam diperdagangkan untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual di Eropa, Timur Tengah, dan bagian Asia lainnya (Australian Institute of Criminology, 2021).

Pada tingkat yang lebih rendah, Vietnam adalah negara tujuan bagi anak-anak Kamboja dan Laos yang diperdagangkan untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Pelaku kriminal yang terlibat dalam pasar ini antara lain agen perekrutan lokal, anggota keluarga dan kenalan korban, serta pelaku asing. Aktor yang melekat pada negara juga diketahui memfasilitasi operasi perdagangan manusia lintas batas negara. Munculnya kejahatan dunia maya yang canggih telah berkontribusi pada aktivitas perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam pun kemudian menganggap serius masalah perdagangan manusia, terbukti dengan kecambahannya terhadap para pelaku perdagangan manusia (Australian Institute of Criminology, 2021)

Lebih dari 70% korban perdagangan manusia di Vietnam adalah perempuan dan anak-anak dari daerah perbatasan yang dilanda kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa laporan mengatakan bahwa sindikat perdagangan orang mengelabui para korban untuk membawa mereka ke luar negeri sebagai pekerja paruh waktu bergaji tinggi, tetapi kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai pekerja paksa dan pekerja sex.

Sebagian dari mereka diperdagangkan untuk menjadi perempuan pekerja sex dan sebagian lagi dijual untuk melahirkan di China atau diambil organ tubuhnya untuk dijual. Perdagangan manusia menduduki peringkat pertama sebagai sumber pendapatan terbesar ketiga untuk kejahatan terorganisir setelah perdagangan senjata dan narkoba menurut organisasi anti-perdagangan manusia (Quy 2020).

Pasar penyelundupan manusia Vietnam diyakini telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Banyak warga negara Vietnam memperkerjakan penyelundup untuk mencari stabilitas ekonomi di luar negeri, khususnya bagian lain di Asia dan Eropa. Jaringan penyelundupan sangat terorganisir dan terkait erat dengan masyarakat di negara tujuan.

### **3.2 Regulasi Vietnam terhadap permasalahan perdagangan manusia**

Upaya pemerintah Vietnam dalam mengatasi praktik perdagangan manusia dapat ditunjukkan dengan keputusan Vietnam untuk membuat kesepakatan penanganan perdagangan manusia dengan negara lain dan organisasi internasional. Vietnam menandatangani kesepakatan dengan beberapa negara GMS, yaitu Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Memorandum of Understanding (COMMIT MoU) atau dikenal juga dengan Sub-regional Plan of Action (SPA I 2005-2007).

SPA I 2005-2007 merupakan kesepakatan tentang pelatihan prioritas, identifikasi korban dan penangkapan pelaku, Rencana Aksi Nasional (RAN), menjalin kerjasama multisektoral dan bilateral, penanganan praktik eksploitatif percaloan, perlindungan dan reintegrasi korban, pemantauan, dan evaluasi, serta kerjasama di bidang pariwisata. Sedangkan SPA II 2008-2010 menitikberatkan pada perlunya potensi negara-negara GMS untuk memerangi perdagangan manusia secara kolaboratif dan efektif (Le, 2017).

Vietnam juga menjalin hubungan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam PBB yakni, Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like-minded ASEAN Member Countries (ASEAN MLAT) pada tahun 2004. Kesepakatan ini mendjadi pedaman ASEAN untuk menjalin Kerjasama dalam rangka memerangi kejahatan transnasional terorganisir.

Vietnam juga menandatangani dokumen multilateral lainnya dengan ASEAN, yaitu ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Terutama Perempuan dan Anak tahun 2004 (ASEAN 2006). Vietnam juga telah menyepakati perjanjian dengan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Protokol Menekan, Mencegah, dan Menghukum Sindikat Pelaku Perdagangan Manusia, Khususnya perempuan dan anak, dalam melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir atau yang sering disebut UN TIP Protocol pada 8 Juni 2012 (PBB 2015).

Selain itu Vietnam telah meratifikasi beberapa konvensi terkait keamanan manusia dan konvensi terkait perlindungan hak asasi manusia internasional diantaranya yaitu, UN Protocol To Prevent Suppress And Punish Trafficking In Persons (2000), yang telah diratifikasi pada tahun 2012, Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (2000), diratifikasi pada tahun 2001, Ilo Convention 29 On Forced Labour (1930), diratifikasi pada tahun 2007, Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (2000), diratifikasi pada tahun 2001, Ilo Convention 105 On The Abolition Of Forced Labour (1957), diratifikasi pada tahun 2020, dan Ilo Convention 182 Elimination Of Worst Forms Of Child Labour (1999), diratifikasi pada tahun 2007.

Pemerintah Vietnam dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia, yakni membentuk Badan Program Aksi Harian Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, dalam hal untuk mencegah semua kegiatan perdagangan manusia yakni perempuan dan anak-anak. Selain itu juga pemerintah Vietnam melalui badan-badan fungsional Vietnam juga telah memperkuat kerja sama internasional dengan badan-badan pelaksana hukum, seperti sektor kepolisian nasional, antara lain dengan berfokus pada jalur Interpol dan ASEANPOL dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (HOA, 2016).

Pemerintah Vietnam dalam upayanya juga telah mengembangkan beberapa regulasi untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia di negara Vietnam. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Vietnam tercantum dalam undang-undang negaranya, yaitu No. 66/2011/QH12. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penerimaan, pembuktian, perlindungan, dan pendampingan bagi korban perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyembuhan dan perlindungan para korban (United Nations 2011).

Undang-undang tersebut masuk ke dalam Law No. 66/2011/QH12 yang dikeluarkan pada 12 Maret 2011, tertulis dalam Human Trafficking Prevention and Combat yang tercantum dalam Prime

Ministerial Decision 1427/QĐ-TTg yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011 tentang the Action Program on Prevention. Dalam peraturan perundang-undangan ini membahas tentang usaha yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya yang terjadi di negaranya.

Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan kebijakan-kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di Vietnam. Adapun peraturan-perturan tersebut tertulis dalam pasal empat 4, pasal 5 dan pasal enam 6. Pemerintah Vietnam juga memberikan perlindungan terhadap para korban, peraturan ini tertulis dalam pasal tujuh 7 dan pasal delapan 8 (United Nation 2011).

Permasalahan lain muncul ketika Pemerintah Vietnam belum memiliki Komisi Perlindungan HAM di negaranya, cukup logis jika hal ini menjadi salah satu alasan mengapa di Vietnam masih terdapat banyak kasus perdagangan manusia atau eksploitasi manusia. Pemerintah Vietnam hanya meratifikasi beberapa konvensi kemanusiaan atau konvensi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Internasional. Dari beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Pemerintah Vietnam, hanya ada dua konvensi yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak (Thontowi 2019).

### **3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Manusia di Vietnam**

Menurut PBB, ada beberapa faktor yang mendasari perdagangan manusia di Vietnam, yaitu faktor ekonomi, antara lain: kemiskinan pendidikan, hutang, masalah keluarga, kurangnya kesadaran, pengaruh eksternal seperti nilai-nilai konsumen, kurangnya pekerjaan dan pengaruh teman sebaya (Larsen 2011). Selain faktor ekonomi, ada juga faktor dari budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan, seperti masih banyaknya keterbatasan akses perempuan yakni seperti pekerjaan, pendidikan dan keterlibatan dalam pemerintahan. Melihat realita inilah yang akhirnya juga menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia di Vietnam.

Faktor globalisasi juga mempengaruhi tingkat perdagangan manusia yaitu adanya aktor non-negara yang berpotensi mengancam keamanan internasional yaitu organisasi kriminal transnasional (transnational crime organizations). transnational crime organizations (TCO) kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut, didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: pertama, lemahnya kemampuan aparat hukum dalam menghadapi semakin banyaknya kegiatan ekonomi transnasional. Situasi ini memudahkan TCO untuk menyembunyikan berbagai transaksi ilegal mereka. Kedua, kemudahan transportasi di tingkat internasional. TCO memanfaatkan kesempatan ini untuk memobilisasi produk mereka, berwujud dan tidak berwujud, yaitu manusia, uang, dan informasi lintas batas.

Banyak faktor yang menyebabkan perdagangan manusia, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan manusia, karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin dengan pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, dari daerah kumuh pedesaan atau perkotaan, dan masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius. Anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti kehilangan pendapatan/orang tua, pasangan/orang tua sakit parah, anak putus sekolah, pencari kerja (termasuk buruh migran), orang tua meninggal, kerusakan psikologis, korban kekerasan fisik, seksual, janda akibat pernikahan dini, perempuan dan anak jalanan, korban penculikan yang dipaksa oleh orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bekerja di luar negeri menjanjikan penghasilan lebih.

## **4. Kesimpulan**

Beberapa hambatan yang menjadi persoalan dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi yaitu faktor ekonomi, Lemahnya kapabilitas aparat hukum dalam menjaga keamanan Vietnam, Kemudahan transportasi di level internasional sehingga memfasilitasi dan memberikan kemudahan

bagi sindikat transnational criminal organizations dalam menjalankan tindak kriminalnya, dan juga perubahan ekonomi, politik serta kemajuan teknologi komunikasi di level global berkontribusi atas munculnya aktor non negara yang berpotensi mengancam keamanan.

Pemerintah Vietnam juga menerapkan berbagai kebijakan untuk melindungi warga negaranya, yang telah menjadi korban perdagangan manusia dan juga kebijakan mengenai pencegahan terjadinya perdagangan manusia, seperti pembutan kebijakan, meratifikasi beberapa konvensi terkait keamanan manusia dan konvensi terkait perlindungan hak asasi manusia internasional, Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, membentuk Badan Program Aksi Harian Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, Pemerintah Vietnam melalui badan-badan fungsional Vietnam juga telah memperkuat kerja sama internasional dengan badan-badan pelaksana hukum, seperti sektor kepolisian nasional, antara lain dengan berfokus pada jalur Interpol dan ASEANPOL, Pembuatan UU No. 66/2011/QH12 yang tentang usaha yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya.

Namun, pada kenyataannya Pemerintah Vietnam belum mampu memberikan atau melaksanakan kebijakannya secara efektif. Hal ini terlihat dari peristiwa yang terjadi selama tahun 2015-2021 yakni masih banyaknya jumlah korban perdagangan manusia. Dalam praktiknya, Pemerintah Vietnam masih lalai dalam merealisasikan kebijakannya. Tidak banyak orang Vietnam yang mendapatkan perlindungan yang layak secara undang-undang dan kebijakan pemerintah Vietnam masih kurang dalam menegakkan keamanan dari ancaman kejahatan transnasional, sehingga hal tersebut mengakibatkan masih tingginya kasus perdagangan manusia di Vietnam.

#### Daftar Pustaka

- Anthony, M. (Ed.). (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*. SAGE Publications Asia-Pacific.
- Australian Institute of Criminology. (2021). *Crime & justice research 2021* (M. Phelan, Ed.). Australian Institute of Criminology. <https://doi.org/10.52922/sp78061>
- Caballero, M. (n.d.). *Non-traditional security in Asia*. 2013.
- Gallaghe, A. T. (2016). What's Wrong with the Global Slavery Index. *Walk Free Foundation*.
- Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. (2017). *International Labour Organization and Walk Free Foundation, 2017*, 5.
- Gozdziak, E. M., & Collett, E. A. (2005). Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey. *International Organization for Migration*, 339.
- Nguyen, D. V., Nguyen, C. H., Le, T. Q., & Danh, T. (2020). Human Trafficking in Vietnam: The Issues and Responses of the Vietnamese Government. *International Journal of Innovation*, 13(7), 19.
- Sagena, U. (2013). *Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor*.
- Sari, B. R. (2016). The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry: Internal and External Case Study. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(2), 221-236.
- Thontowi, J. (2019). *Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum Internasional*.
- Kranrattanasuit, N. (2014). *ASEAN and human trafficking: Case studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).

- Anugerah, D. O., & Deniar, S. M. (2022). Upaya UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Vietnam Tahun 2017-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 924-938.
- Hung, T. T., & Hoang, L. T. (2020). Preventing human trafficking in Vietnam through economic empowerment programmes. *International journal of criminology and sociology*, 9, 1-8.
- Le, T. H. (2017). Human trafficking in Vietnam: Preventing crime and protecting victims through inter-agency cooperation. Queensland University of Technology.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1-16.
- Madsen, F. (2009). *Transnational organized crime*. Routledge.
- Picarelli, J. T. (2008). *Transnational organized crime*. In *Security Studies* (pp. 477-491). Routledge.
- Shelley, L. I. (1995). Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?. *Journal of international affairs*, 463-489.
- Cao, N. A., & Cao, N. A. (2017). *Timber trafficking in Vietnam* (pp. 145-214). Springer International Publishing.

